



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini pun berorientasi pada hasil yang bersifat pasti, jelas, spesifik, dan pembukaan hipotesis. Untuk penghitungannya sendiri menggunakan analisis matematika sehingga hasil perhitungan lebih tepat.

Adapun karakteristik pendekatan kuantitatif, yakni (Kriyantono, 2009: 56):

1. Hubungan riset dengan subjek: jauh. Periset menganggap bahwa realitas terpisah dan ada di luar dirinya, karena itu harus ada jarak supaya objektif.
2. Riset bertujuan untuk menguji teori dan hipotesis, mendukung atau menolak teori. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau teori dibuktikan dengan data. Jika dalam analisis itu ditemukan sebuah penolakan akan teori, maka peneliti harus kembali melakukan pengecekan terkait teknik *sampling* tersebut.
3. Riset harus dapat digeneralisasikan, karena itu menuntut sampel yang representatif dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep, serta alat ukur yang valid dan reliabel.

4. Prosedur riset rasional-empiris, artinya penelitian berangkat dari konsep atau teori yang melandasinya. Konsep atau teori inilah yang akan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan di lapangan.

Menurut Eriyanto (2011: 46-47), suatu pendekatan penelitian analisis isi terbagi atas tiga jenis, yakni analisis isi deskriptif, analisis eksplanatif, dan analisis prediktif. Analisis isi deskriptif hanyalah sebatas menggambarkan sebuah pesan, sementara analisis isi eksplanatif berusaha untuk menguji hubungan di dalam variabel. Untuk analisis isi prediktif ditujukan sebagaimana untuk memprediksi variabel lain dengan menggunakan suatu variabel itu sendiri.

Penelitian yang dikaji ini pun bersifat deskriptif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sifat penelitian ini hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Sementara, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis maupun menguji hubungan di antara variabel.

Maka, dalam penelitian ini yang dilihat adalah analisis peran politik pers atas pemberitaan media *Harian Kompas* tentang kasus rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah, apakah sebagai agen stabilitas atau agen pengawasan.

### 3.2 Metode Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian, tentu dibutuhkan sebuah metode. Dalam metodologi kuantitatif dikenal beberapa metode, yakni Metode Riset yang terbagi atas Survei Deskriptif dan Survei Eksplanatif, Metode Analisis Isi, dan Metode Eksperimen (Kriyantono, 2009: 58-62).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Analisis Isi. Menurut Kriyantono (2009: 60), Metode Analisis Isi adalah sebuah metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif.

Sistematis berarti bahwa segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematis, mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, dan kategori yang digunakan untuk menganalisis.

Objektif berarti periset harus mengesampingkan faktor-faktor yang bersifat subjektif atau bias personal sehingga hasilnya memang benar-benar objektif dan relatif sama apabila dilakukan riset lagi oleh orang lain. Dalam hal ini, analisis isi kuantitatif pun hanya lebih memfokuskan kepada isi komunikasi yang tampak (*tersurat/manifest/nyata*), bukan menjelaskan hal-hal yang tersirat (*latent*).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Dalam sebuah riset sosial, Kriyantono (2009: 151) mengungkapkan seorang peneliti tidak diharuskan untuk meriset seluruh objek yang dijadikan pengamatan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki, baik biaya, waktu, dan tenaga. Kenyataannya, periset dapat mempelajari, memprediksi, dan menjelaskan sifat-sifat suatu objek atau fenomena hanya dengan mempelajari dan mengamati sebagian dari objek maupun fenomena tersebut.

Sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati disebut dengan sampel. Sementara, keseluruhan objek atau fenomena yang diriset disebut populasi.

Dalam riset komunikasi dikenal dengan dua jenis teknik *sampling*, yakni *pertama* sampel probabilitas, adalah sampel yang ditarik berdasarkan probabilitas yang setiap unsur populasi memiliki kemungkinan sama untuk dipilih melalui perhitungan secara matematis. *Kedua*, sampel nonprobabilitas, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari periset.

Adapun rancangan *sampling* probabilitas, yakni:

1. *Sampling* Random Sederhana merupakan teknik yang paling mudah dilakukan, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Periset biasanya menulis atau memberi nomor pada semua anggota populasi, lalu

mengundinya sampai mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan.

2. *Sampling* Sistematis. Mulanya, periset akan merandom sampel pertama, lalu data berikutnya menggunakan interval tertentu. Teknik ini membutuhkan ketersediaannya kerangka *sampling* atau daftar *sampling*. Dibanding dengan *Sampling* Random Sederhana, teknik ini dianggap lebih memudahkan seleksi terhadap populasi yang besar dan lebih akurat serta menghemat waktu dan tenaga.
3. *Sampling* Berstrata. Dalam teknik ini, populasi dikelompokkan dalam kategori yang disebut dengan strata, yang dapat berupa usia, kota, jenis kelamin, dan sebagainya. Tujuannya pun guna membuat sifat homogen dari populasi yang heterogen. Seitel dalam Kriyantono (2009: 154) menambahkan bahwa teknik ini memang biasa digunakan untuk populasi yang bersifat heterogen karena memang biasa digunakan untuk mensurvei segmen atau strata yang berbeda dari suatu populasi.
4. *Sampling* Kluster. Teknik ini merupakan salah satu alternatif apabila periset tak memiliki kerangka *sampling*. Dalam teknik ini, populasi yang berada di daerah besar dibagi dalam beberapa area yang lebih kecil yang jelas batas-batasnya.

Sementara, rancangan *sampling* nonprobabilitas, terdiri dari:

1. *Sampling* Purposif merupakan teknik yang mencakup orang-orang, di mana atas dasar seleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu

yang dijadikan sebagai tujuan riset. Kemudian, orang-orang yang tidak sesuai kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.

2. *Sampling Kuota* merupakan teknik yang hampir sama dengan teknik purposif. Namun, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki kriteria-kriteria tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan periset.

3. *Sampling Berdasarkan Kemudahan*. Dalam teknik ini, periset bisa memilih siapa saja anggota populasi yang memiliki data berlimpah dan mudah diperoleh periset.

4. *Sampling Kebetulan* adalah memilih siapa saja yang kebetulan dijumpai untuk dijadikan sampel. Tujuan teknik ini adalah lantaran periset mengalami kesulitan untuk menemui responden atau karena topik terkait persoalan umum di mana semua orang mengetahuinya.

5. *Sampling Snowball* biasanya lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil, lalu berkembang semakin banyak. Orang yang dijadikan sampel pun akan menunjuk orang lain untuk dijadikan sampel lagi, dan begitu selanjutnya.

Namun, lantaran jumlah populasi yang masih dapat dijangkau, peneliti meneliti keseluruhan populasi yang ada, disebut dengan *Totally Random Sampling*. Berbeda dengan sampel *coding*, peneliti menggunakan teknik *Sampling Random Sederhana (Simple Random Sampling)*, di mana

mengocok dadu lalu memilih 10% dari populasi yang ada untuk dijadikan sampel artikel bagi para koder.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Artikel Populasi**

No	Tanggal	Rubrik	Hal	Judul
1.	30 Agustus 2014	Politik dan Hukum	2	RUU Pemilihan Kepala Daerah Keputusan Diambil Melalui Voting
2.	1 September 2014	Politik dan Hukum	4	RUU Pilkada Mendesak Pemilihan oleh DPRD Tak Sejalan dengan Visi Pemerintah Baru
3.	2 September 2014	Politik dan Hukum	5	Pemerintah Mendengar Rakyat, Kepala Daerah Tetap Dipilih Bukan oleh DPRD
4.	3 September 2014	Politik dan Hukum	2	Legislasi RUU Pilkada Diputus September
5.	4 September 2014	Politik dan Hukum	3	5 Fraksi di DPR Berubah Sikap Konstelasi Politik Pengaruhi RUU Pilkada
6.	5 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	RUU Pilkada Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD



7.	6 Septmber 2014	Berita Utama	1 dan 15	Pilkada Langsung Akan Dipatahkan Formappi: Ini Melecehkan Rakyat
8.	6 September 2014	Tajuk Rencana	6	Membajak Demokrasi
9.	7 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	RUU Pilkada Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat
10.	8 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	SBY Diminta Jaga Demokrasi KPK:Pilkada oleh DPRD Bisa Suburkan Korupsi
11.	8 September 2014	Tajuk Rencana	6	Konstitusi Harus Jadi Penjuru
12.	9 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Daulat Rakyat Jangan Direbut Penghapusan Pilkada Langsung Bisa Jadi Bumerang Bagi Parpol Kecil
13.	9 September 2014	Opini	6	Pilkada di Lorong Gelap DPRD
14.	9 September 2014	Opini	6	Merampas Daulat Rakyat
15.	9 September 2014	Opini	7	Produk Cacat DPR
16.	10 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	6 Fraksi Tentang Suara Rakyat, Politik Berharap Presiden SBY Tak Dukung Pencabutan Hak Politik
17.	10 September 2014	Politik dan Hukum	2	Apeksi-Apeksi Tolak Pemilihan oleh DPRD
18.	10 September 2014	Opini	6	Demokrasi di Ujung Tanduk

19.	11 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Daerah Tolak Pilkada di DPRD Basuki Tjahaja Purnama Pilih Mundur dari Partai Gerindra
20.	12 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Kepala Daerah Ingatkan SBY KPU Pilkada oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Dunia
21.	12 September 2014	Politik dan Hukum	2	Pilkada Ahok dan Cinta Tanah Air....
22.	13 September 2014	Berita Utama	1	E-Voting; Hemat dan Aman, Pemilu Langsung Investasi Masa Depan Demokrasi Indonesia
23.	13 September 2014	Politik dan Hukum	2	Jangan Main-main dengan Rakyat!
24.	14 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Kalla: Dengarkan Suara Rakyat Penolakan di Sejumlah Tempat
25.	15 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	RUU Pilkada Presiden Berupaya Cari Solusi Terbaik
26.	15 September 2014	Politik dan Hukum	4	Rakyat Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus
27.	15 September 2014	Tajuk Rencana	6	Menanti Warisan SBY
28.	16 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	RUU Pilkada Peta Politik di DPR Diyakini Berubah
29.	16 September 2014	Politik dan Hukum	3	Pilkada Langsung KPU Siapkan Aturan
30.	16 September	Opini	6	Pilkada Tanpa Rakyat

	2014			
31.	17 September 2014	Politik dan Hukum	2	Surat Terbuka ke SBY Dewan Pertimbangan Presiden Dukung Pilkada Langsung
32.	17 September 2014	Politik dan Hukum	2	RUU Pilkada Tak Sekadar Pilih Langsung atau Tidak Langsung
33.	17 September 2014	Opini	6	RUU Rahasia Negara
34.	17 September 2014	Opini	7	Sengketa DPR Rakyat
35.	18 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	RUU Pilkada Presiden Bisa Tolak Pengesahan di Sidang Paripurna
36.	18 September 2014	Opini	7	Korupsi Demokrasi
37.	19 September 2014	Berita Utama	1	Voting DPR Demokrat Dukung Pilkada Langsung
38.	19 September 2014	Politik dan Hukum	2	Rakyat Setuju dengan Demokrat Syarat Demokrat Soal Pilkada Sudah Ada di RUU
39.	20 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Jangan Rebut Hak Rakyat Ubah Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat
40.	20 September 2014	Opini	6	Politik Malin Kundang
41.	20 September 2014	IPTEK, Lingkungan dan Kesehatan	14	'E-Voting' Bisa Untuk Pilkadaes Hingga Pemilu
42.	21 September 2014	Politik dan Hukum	2	RUU Pilkada Melepas Belenggu

				Oligarki Politik
43.	22 September 2014	Berita Utama	1	RUU Pilkada Setiap Fraksi Akan Nyatakan Sikap Kembali
44.	22 September 2014	Tajuk Rencana	6	Langkah Politik Yudhoyono
45.	23 September 2014	Politik dan Hukum	2	Kaum Perempuan Bergerak Demokrat Perintahkan Semua Anggota Hadiri 'Voting' Terbuka Soal RUU Pilkada
46.	23 September 2014	Opini	7	Jangan Rampas Hak Rakyat
47.	24 September 2014	Politik dan Hukum	2	RUU Pilkada Dengarlah Suara Rakyat!
48.	24 September 2014	Politik dan Hukum	2	Etika Hakim MK Patrialis: Ada yang Ingin Menjatuhkan Saya
49.	24 September 2014	Opini	6	Menanti Kado Istimewa SBY
50.	24 September 2014	Opini	7	Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif
51.	25 September 2014	Politik dan Hukum	2	Paripurna DPR Jadi Penentu Meski Dua Opsi, Beda Sikap Fraksi soal RUU Pilkada Terlalu Banyak
52.	26 September 2014	Berita Utama	1 dan 15	Fraksi Demokrat <i>Walk Out</i> Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors

53.	26 September 2014	Opini	6	Parpol dan Masyarakat Warga
-----	-------------------	-------	---	-----------------------------

### 3.4 Kategorisasi

Dalam penelitian ini, peran politik pers dikategorikan menjadi tiga sisi, yakni pro, netral, dan kontra. Maka, untuk menganalisisnya, dapat dilihat dari judul, isi, dan narasumber dalam artikel.

**Tabel 3.2**  
**Kategorisasi Berdasarkan Judul Artikel**

JUDUL	Pro	Pers dalam konteks demokrasi tidak memainkan peran sama sekali apabila judul artikel dikategorikan pro terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
	Netral	Pers berperan sebagai <i>Agent of Stability</i> (Agen Stabilitas) dalam konteks demokrasi apabila judul artikel dikategorikan netral terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

	Kontra	Pers berperan sebagai <i>Agent of Restraint</i> (Agen Pengawasan) dalam konteks demokrasi apabila judul artikel dikategorikan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
--	--------	--

**Tabel 3.3**  
**Kategorisasi Berdasarkan Isi Artikel**

ISI ARTIKEL	Pro	Pers dalam konteks demokrasi tidak memainkan peran sama sekali apabila isi artikel dikategorikan pro terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
	Netral	Pers berperan sebagai <i>Agent of Stability</i> (Agen Stabilitas) dalam konteks demokrasi apabila isi artikel dikategorikan netral terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU

		Pilkada).
	Kontra	Pers berperan sebagai <i>Agent of Restraint</i> (Agen Pengawasan) dalam konteks demokrasi apabila isi artikel dikategorikan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

**Tabel 3.4**  
**Kategorisasi Berdasarkan Narasumber pada Artikel**

NARASUMBER	Pro	Pers dalam konteks demokrasi tidak memainkan peran sama sekali apabila narasumber yang dikutip kebanyakan menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
	Netral	Pers berperan sebagai <i>Agent of Stability</i> (Agen Stabilitas) apabila narasumber yang dikutip seimbang jumlahnya antara pro

		dan kontra terhadap kasus RUU Pilkada.
	Kontra	Pers berperan sebagai <i>Agent of Restraint</i> dalam konteks demokrasi apabila mayoritas narasumber yang dikutip berpandangan kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Seorang periset harus melakukan kegiatan pengumpulan data karena menentukan baik tidaknya riset. Secara umum, data kuantitatif bersifat objektif dan dapat ditafsirkan oleh semua orang. Pada riset kuantitatif, data dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan statistik (Kriyantono, 2009: 39).

Selain itu, menurut sumbernya, Kriyantono mengungkapkan pengumpulan data terbagi atas dua jenis, yakni data primer dan sekunder (Kriyantono, 2009: 41).



### 3.5.1 Data primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengambil data-data mentah tersebut di sebuah Harian surat kabar *Kompas* periode 30 Agustus 2014 – 26 September 2014 dengan kata kunci Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

### 3.5.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang bertujuan untuk melengkapi data primer dan biasanya sangat membantu periset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Maka, data sekunder ini diperoleh dengan melakukan wawancara semi struktur, skripsi, buku, dan situs internet mengenai rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada).

Untuk data sekunder, peneliti melakukan wawancara dengan Redaktur Pelaksana Harian *Kompas*, James Luhulima. Selain itu, peneliti juga melengkapi penelitian dengan mewawancarai dua pengamat politik, yakni Syamsuddin Haris dan Ikrar Nusa Bhakti.

### 3.6 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Kaplan dan Goldsen (Dalam Eriyanto, 2011: 281), pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen, atau orang yang mengukurnya. Reliabilitas juga melihat pada apakah alat ukur dapat dipercaya menghasilkan temuan yang sama, ketika dilakukan oleh orang yang berbeda.

Reliabilitas dalam analisis isi kuantitatif pun dimengerti sebagai persetujuan antara koder-koder mengenai isi dari kategorisasi yang ada. Maka, pengukuran dalam penelitian ini menggunakan tiga orang koder.

Koder pertama adalah peneliti sendiri. Sementara koder kedua adalah Dosen Komunikasi Massa di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Harry Febrian dan koder ketiga adalah *Video Journalist Watchdoc*, Randy Hernando.

Agar objektif, maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya, terutama kategorisasi yang dibuat sendiri oleh periset sehingga belum memiliki standar yang telah teruji, maka dilakukan uji reliabilitas. Dalam analisis isi, ada beberapa formula yang digunakan untuk menghitung derajat reliabilitas tersebut, yakni persentase persetujuan, Formula Holsti, Formula Scott, Formula Cohen, dan Formula Krippendorff.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Formula Holsti, yakni uji reliabilitas antar – *coder* yang banyak digunakan selain persentase persetujuan (Neuendorf dalam buku Analisis Isi Eriyanto, 2011:

149). Mulanya, formula ini diperkenalkan oleh Ole R. Holsti pada 1969. Pada dasarnya, reliabilitas ini hampir mirip dengan persentase persetujuan. Reliabilitas pun ditunjukkan dalam persentase persetujuan seberapa besar persentase persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi.

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder (CR)} = \frac{3M}{N1 + N2 + N3}$$

Di mana,

M = Jumlah *coding* yang sama (Disetujui tiga *coder*)

N1 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1

N2 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2

N3 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 3

Reliabilitas bergerak antara 0 dan 1, di mana tidak ada satupun yang disetujui oleh para *coder* dan 1 berarti persetujuan sempurna di antara para *coder*. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitas

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tapi jika di bawah angka 0,7, berarti alat ukur bukan alat yang reliabel.

Berikut penghitungan berdasarkan kategorisasi yang telah dilakukan.

### 3.6.1 Perhitungan realibilitas kategori judul

**Tabel 3.5**  
**Perhitungan Reliabilitas Kategori Judul**

	Artikel				
	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4	Artikel 5
Koder 1	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra
Koder 2	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra
Koder 3	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra

Keterangan:

Artikel 1: Pemerintah Mendengar Rakyat, Kepala Daerah Tetap Dipilih Bukan oleh DPRD

Artikel 2: RUU Pilkada, Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Artikel 3: RUU Pilkada, Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat

Artikel 4: Jangan Rebut Hak Rakyat, Ubah Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat

Artikel 5: Jangan Rampas Hak Rakyat

Maka, berdasarkan rumus Holsti, hasilnya adalah sebagai berikut.

CRM Judul

$$CR = \frac{3(5)}{5+5+5} \times 100\% = 100\%$$

### 3.6.2 Perhitungan realibilitas kategori isi artikel

**Tabel 3.6**  
**Perhitungan Reliabilitas Kategori Isi Artikel**

	Artikel				
	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4	Artikel 5
Koder 1	Kontra	Kontra	Kontra	Netral	Kontra
Koder 2	Kontra	Kontra	Kontra	Netral	Kontra
Koder 3	Kontra	Kontra	Kontra	Netral	Kontra

Keterangan:

Artikel 1: Pemerintah Mendengar Rakyat, Kepala Daerah Tetap Dipilih Bukan oleh DPRD

Artikel 2: RUU Pilkada, Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Artikel 3: RUU Pilkada, Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat

Artikel 4: Jangan Rebut Hak Rakyat, Ubah Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat

Artikel 5: Jangan Rampas Hak Rakyat

Maka, berdasarkan rumus Holsti, hasilnya adalah sebagai berikut.

CRM Isi Artikel

$$CR = \frac{3(5)}{5+5+5} \times 100\% = 100\%$$

### 3.6.3 Perhitungan realibilitas kategori narasumber

**Tabel 3.7**  
**Perhitungan Reliabilitas Kategori Narasumber**

	Artikel				
	Artikel 1	Artikel 2	Artikel 3	Artikel 4	Artikel 5
Koder 1	Kontra	Kontra	Kontra	Kontra	-
Koder 2	Kontra	Kontra	Kontra	Netral	-
Koder 3	Kontra	Kontra	Kontra	Netral	-

Keterangan:

Artikel 1: Pemerintah Mendengar Rakyat, Kepala Daerah Tetap Dipilih Bukan oleh DPRD

Artikel 2: RUU Pilkada, Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Artikel 3: RUU Pilkada, Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat

Artikel 4: Jangan Rebut Hak Rakyat, Ubah Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat

Artikel 5: Jangan Rampas Hak Rakyat

Maka, berdasarkan rumus Holsti, hasilnya adalah sebagai berikut.

CRM Narasumber

$$CR = \frac{3(4)}{5+5+5} \times 100\% = 80\%$$

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti membaca data melalui proses pengkodean data sehingga memiliki makna. Proses pengkodean ini mencakup dalam proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam pola kategori (Kriyantono, 2009: 165).

Moleong (Dalam Kriyantono, 2009: 165) mengatakan, analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar hingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data tersebut.

Pada riset kuantitatif, dikenal beberapa jenis analisis. Adapun yang menjadi pembeda adalah tergantung dari banyaknya variabel yang akan dianalisis (Kriyantono, 2009: 166).

#### 1. Analisis Uvariat

Merupakan analisis terhadap satu variabel yang lebih bersifat kepada riset deskriptif dan menggunakan statistik deskriptif pula.

Hasil penghitungan statistik deskriptif ini nantinya merupakan dasar bagi penghitungan analisis berikutnya, misalnya untuk menghitung hubungan antar variabel.

#### 2. Analisis Bivariat

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel.

Kedua variabel pun merupakan variabel pokok, yakni variabel pengaruh (bebas) dan variabel terpengaruh (tak bebas).

### 3. Analisis Multivariat

Sama halnya dengan analisis bivariat, hanya saja pada analisis multivariat, jumlah variabelnya lebih dari dua. Namun, sama-sama tetap memiliki dua variabel pokok, hanya variabel bebasnya terdiri dari sub-subvariabel.

Setelah semua data telah di-*coding*, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan input atau rekap data. Data yang dilakukan dalam teknik analisis data ini adalah dengan menyederhanakan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.

Analisis data inilah yang berasal dari hasil pengumpulan data. Maka, hasil-hasil yang diperoleh harus dapat diterjemahkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Hal itulah yang membutuhkan kerja keras dan kemampuan intelektual agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

UMMN